

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas upaya Amerika Serikat di era Pemerintahan Joe Biden dalam melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan kendati masih terdapat penolakan terhadap kedaulatan Taliban sebagai entitas pemangku kebijakan di Afghanistan. Kekacauan yang terjadi pada 15 Agustus 2021 setelah Presiden Biden memutuskan menarik keseluruhan militer di Afghanistan secara langsung juga menghentikan invasi dan perang AS dengan Taliban selama 20 tahun setelah melewati empat era Presiden (Presiden George W. Bush, Presiden Barack Obama, Presiden Donald Trump, dan Presiden Joe Biden). Setelah kebijakan penarikan militer dilakukan, Amerika Serikat lewat Presiden Joe Biden tetap memutuskan untuk melanjutkan bantuan luar negeri ke negara ini kendati Amerika Serikat sudah tidak memiliki kepentingan lagi. Pertanyaan muncul terkait alasan yang memotivasi Pemerintahan Joe Biden untuk tetap melanjutkan bantuan kemanusiaan.

Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut menggunakan Teori Realisme Neo-Klasik sebagai alternatif dalam menjelaskan Kebijakan Luar Negeri menggunakan premis dan alur berpikir penelitian yang menggabungkan Faktor Eksternal (*Eksternal Independent Variabel*) dimana dalam penelitian ini Amerika Serikat masih dipengaruhi oleh posisi dan kapasitas materinya sebagai negara donor terbesar sehingga melanjutkan bantuan kemanusiaan menciptakan tanggung jawab

moral untuk mereparasi kehancuran pasca invasi serta untuk mempertahankan hegemoni AS di Afghanistan. Faktor yang kedua merupakan Faktor Domestik (*Intervening Variabel*) sebagai jembatan dari Faktor Eksternal tersebut dimana di sisi Domestik, Pemerintahan Joe Biden dipengaruhi oleh dua faktor: Pertama, persepsi Joe Biden sebagai pemimpin yang ingin membuat Amerika Serikat memiliki kegunaan nyata di dunia internasional dengan menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai metode untuk mempertahankan dan meningkatkan citra Amerika Serikat di panggung internasional sehingga dapat membuktikan bahwa pengaruh Amerika Serikat dan komitmen terhadap kerjasama global dan stabilitas regional di Afghanistan masih dapat dipertahankan kendati sudah tidak memiliki kepentingan melalui operasi militer.

Kedua, Pemerintahan Joe Biden dipengaruhi tekanan dari oposisi dan publik Amerika Serikat seputar penarikan militer yang dianggap menimbulkan kekacauan dengan begitu Pemerintahan Joe Biden menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai cara untuk menjawab kritik bahwa Amerika Serikat kendati tidak lagi memiliki kepentingan invasi di Afghanistan adalah aktor global yang masih menaruh fokus terhadap prospek kemanusiaan global sehingga akan meningkatkan citra Amerika Serikat dan mempertahankan hegemoni di Afghanistan serta bantuan kemanusiaan dijadikan upaya politis untuk mengevaluasi Pemerintah Taliban agar dapat memimpin dengan integritas yang lebih baik karena masih bergantungnya Afghanistan pada alokasi bantuan luar negeri untuk menghidupkan warganya.

Penelitian ini juga menjelaskan AS di era Presiden Joe Biden menjawab paradoks dilema moralitas dalam melanjutkan bantuan kemanusiaan lewat aset

Taliban yang masih dibekukan di bank sentral AS dengan jawaban bahwa AS belum menaruh kepercayaan terhadap integritas rezim Taliban untuk memimpin sehingga segala alur bantuan kemanusiaan tetap diupayakan AS lewat pihak ketiga yang juga bertujuan untuk memaksimalkan status hegemoni AS di negara tersebut pasca invasi. Argumen penelitian ini juga selaras dengan konsep politik bantuan internasional yang digunakan di dalam penelitian bahwa Bantuan Kemanusiaan di dalam kondisi tertentu dapat menjadi fungsi politis bagi negara donor (*donor country*) untuk melanggengkan kepentingannya di negara penerima bantuan (*recipient country*).

4.2 Saran

Dinamika politik dalam penerimaan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Taliban kedepannya akan memungkinkan terjadi melihat Afghanistan telah dipimpin rezim Taliban yang mencoba upaya-upaya hukum dalam mendapatkan tempat dan pengakuan dari dunia internasional sehingga penelitian di masa yang akan datang dapat memberikan perspektif dan analisa baru untuk meneliti dilanjutkannya bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di tengah rezim Taliban yang sedang berkuasa dengan mendalami beberapa evaluasi positif yang telah dilakukan Pemerintah Taliban untuk mengubah orientasi arah kebijakan dalam negeri yang lebih positif lagi untuk warganya. Penelitian ini menggunakan Teori Realisme Neo Klasik sebagai alternatif menjelaskan Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Politik Bantuan Internasional sehingga memungkinkan bagi penelitian terkait di masa yang akan datang untuk meneliti menggunakan pendekatan teori yang berbeda sehingga memunculkan kekayaan perspektif dalam menganalisis alasan Amerika Serikat

melanjutkan bantuan kemanusiaan di tengah rezim yang berkuasa. Pendekatan teori lain memungkinkan melihat pengaruh dominan politik domestik AS dalam isu di Afghanistan memiliki pengaruh kuat tentunya ini selaras dengan beberapa teori yang mengedepankan analisa terhadap pemangku kebijakan seperti teori kebijakan luar negeri, teori idiosinkratik pemimpin, ataupun teori liberalisme yang sifatnya *bottom up* dengan menekankan pada perspektif pemimpin dalam mengambil suatu keputusan.

Saran berikutnya adalah mendalami analisis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai negara *middle power* dengan kapasitas materi di dalam struktur internasional memungkinkan untuk melakukan politisasi bantuan kemanusiaan ke negara penerima donor (*recipient country*) sehingga penelitian yang akan datang dapat mencoba mendalami penelitian kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara penerima donor (*recipient country*). Peluang tersebut terbuka karena arah gerak Indonesia menuju negara maju semakin terbuka dengan begitu ada peningkatan baik dari segi kapasitas materi, kekuatan, dan kapasitas Indonesia di dalam struktur Internasional untuk melakukan politisasi bantuan kemanusiaan ke beberapa negara miskin yang membutuhkan donor. Pada implementasinya di dalam situasi geopolitik sekarang, Indonesia sudah melakukan beberapa politisasi bantuan kemanusiaan seperti ke Fiji dengan menekankan aspek kepentingan politik karena Fiji membantu Indonesia dalam meredam pergerakan organisasi pembebasan Papua Barat. Pada akhirnya, politisasi bantuan kemanusiaan dan motif politis di balik bantuan luar negeri dapat dilakukan oleh negara mana saja dengan memenuhi syarat struktur internasional yang

mendorongnya baik itu dari segi kekuatan, kapasitas geopolitik atau militer, serta kapasitas materi yang memungkinkan negara dalam mengalokasikan bantuan luar negeri.